

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini mencoba menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *anti-corruption disclosure* pada perusahaan, yang meliputi Independensi Dewan Komisaris, Kepemilikan Pemerintah, Ukuran Perusahaan, dan *Media Exposure*. Objek penelitian ini adalah perusahaan peserta Asia Sustainability Reporting Rating pada 2018-2020 yang terdaftar di BEI. Metode *purposive sampling* dalam penelitian ini menghasilkan sebanyak 38 sampel. Sedangkan, perolehan data didapatkan melalui data sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan (2017-2019) yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut adalah tabel yang menunjukkan proses penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan:

Tabel 4.1
Prosedur Penentuan Sampel

| Keterangan | 2018 | 2019 | 2020 | Jumlah |
|--|------|------|------|--------|
| Perusahaan peserta Asia Sustainability Reporting Rating 2018-2020. | 56 | 48 | 44 | 148 |
| Perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020 | (38) | (31) | (22) | (91) |
| Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan atau <i>sustainability report</i> periode 2017-2019. | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam penyusunan laporan tahunan. | (7) | (6) | (6) | (19) |
| Perusahaan yang tidak lengkap dalam menampilkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan anti korupsi pada perusahaan, yang meliputi | (0) | (0) | (0) | (0) |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Independensi Dewan Komisaris, Kepemilikan Pemerintah, Ukuran Perusahaan, dan <i>Media Exposure</i> . | | | | |
| Total Sampel | 11 | 11 | 16 | 38 |

Sumber: data diolah dalam penelitian (2023)

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berguna untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data variabel berdasarkan pengukuran nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif dari variabel dalam penelitian ini:

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Minimum | Maksimum | Mean | Std. Dev |
|----------|----|---------|----------|--------|----------|
| X1_IDK | 38 | 0,300 | 0,800 | 0,480 | 0,137 |
| X2_KP | 38 | 0 | 1 | 0,605 | 0,495 |
| X3_UP | 38 | 29,549 | 34,887 | 32,146 | 1,368 |
| X4_ME | 38 | 0 | 1 | 0,289 | 0,460 |
| Y_ACD | 38 | 0,075 | 0,525 | 0,285 | 0,105 |

Sumber: diolah dalam Penelitian (2023)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.2 didapati bahwa variabel independensi dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 0,300, nilai maksimum sebesar 0,800, dan nilai rata-rata sebesar 0,480. Standar deviasi dari variabel ini sebesar 0,137 atau lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga variabel ini memiliki variabilitas yang rendah.

Variabel kepemilikan pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, dan nilai rata-rata sebesar 0,605. Standar deviasi sebesar 0,495

atau lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel ini memiliki variabilitas yang rendah.

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 29,549, nilai maksimum sebesar 34,887, dan nilai rata-rata sebesar 32,146. Standar deviasi sebesar 1,368 atau lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variabel ini memiliki variabilitas yang rendah.

Variabel *media exposure* memiliki nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, dan nilai rata-rata sebesar 0,289. Standar deviasi dari variabel ini sebesar 0,460 atau lebih besar dari nilai rata-rata, sehingga variabel ini memiliki variabilitas yang tinggi.

Variabel *anti-corruption disclosure* memiliki nilai minimum sebesar 0,075, nilai maksimum sebesar 0,525, dan nilai rata-rata sebesar 0,285. Standar deviasi dari variabel ini sebesar 0,105 atau lebih rendah dari nilai rata-rata, sehingga variabel ini memiliki variabilitas yang rendah.

4.3. Analisis Hasil Penelitian

Model evaluasi dalam Partial Least Square (PLS) terdiri dari model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Setelah dilakukan penilaian *outer model* dan *inner model*, pengujian hipotesis dilakukan.

4.3.1 Hasil Uji Model Pengukuran (Uji *Outer Model*)

Pengujian *outer model* dalam penelitian ini dilakukan melalui pengujian Validitas konvergen. Validitas dapat membuktikan tingkat keabsahan instrumen dengan memastikan bahwa instrumen tersebut dapat mengukur secara tepat apa yang seharusnya diukur, termasuk juga ketepatan dalam mengungkap data atas variabel yang diteliti. Pengujian validitas konvergen dalam penelitian ini menggunakan nilai *outer loadings*. Ketika nilai *outer loadings* > 0,5 maka variabel tersebut telah memenuhi validitas konvergen (Putra & Herianingrum, 2014). Hasil pengujian validitas konvergen melalui *outer loadings* ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Outer Loadings

| | Outer loadings |
|------------------|----------------|
| X1_IDK <- X1_IDK | 1.000 |
| X2_KP <- X2_KP | 1.000 |
| X3_UP <- X3_UP | 1.000 |
| X4_ME <- X4_ME | 1.000 |
| Y_ACD <- Y_ACD | 1.000 |

Sumber: Hasil olah data *Smart PLS 4.0 (2023)*

Berdasarkan hasil *Outer Loadings* pada tabel 4.3, dapat diketahui bahwa variabel Independensi Dewan Komisaris, Kepemilikan Pemerintah, Ukuran Perusahaan, *Media Exposure*, dan *Anti-Corruption Disclosure* adalah valid sebab nilai *Outer Loadings* > 0,05. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa evaluasi uji validitas konvergen dinyatakan valid dan terpenuhi atas semua variabel dalam penelitian ini.

4.3.2 Hasil Uji Model Struktural (Uji *Inner Model*)

Selanjutnya dilakukan uji *inner model* yang berguna untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel. Pengujian *inner model* dalam penelitian ini menggunakan nilai *R Square* (R^2) dan signifikansi *path coefficient*.

4.3.2.1 R-Square (R^2)

Nilai R^2 dirancang untuk menilai kemampuan model untuk menjelaskan variabel-variabel dependennya (Ghozali, 2012). Berikut adalah hasil pengukuran nilai *R Square*:

Tabel 4.4
Hasil R-Square

| | R-square | R-square adjusted |
|-------|----------|-------------------|
| Y_ACD | 0.254 | 0.163 |

Sumber: Hasil olah data *Smart PLS 4.0 (2023)*

Tabel 4.4 menunjukkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,163 sehingga dapat dikatakan bahwa model termasuk lemah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel Independensi Dewan Komisaris, Kepemilikan Pemerintah, Ukuran Perusahaan, dan *Media Exposure* dalam menjelaskan *Anti-Corruption Disclosure* sebesar 16,3%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

4.3.2.2 Signifikansi *Path Coefficient*

Pengujian *inner model* juga dapat dilakukan dengan menggunakan *path coefficients* berdasarkan T-statistik dan P-values. Signifikansi hubungan antar variabel dapat diketahui melalui t-statistik dan P-values. Jika P-values kurang 0,05, ini menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan. Jika P-values lebih dari 0,05, hal itu menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Sementara itu, jika t-statistik lebih besar dari 1,96 berarti terdapat pengaruh signifikan. Sedangkan, jika t-statistik lebih kecil dari 1,96 berarti tidak terdapat pengaruh signifikan. Signifikansi *path coefficient* ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Path Coefficients

| | Original sample (O) | Sample mean (M) | Standard deviation (STDEV) | T statistics | P values |
|----------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------|----------|
| X1_IDK → Y_ACD | -0.024 | -0.036 | 0.158 | 0.151 | 0.880 |
| X2_KP → Y_ACD | 0.233 | 0.292 | 0.314 | 0.742 | 0.458 |
| X3_UP → Y_ACD | 0.017 | 0.020 | 0.164 | 0.106 | 0.916 |
| X4_ME → Y_ACD | 0.961 | 0.916 | 0.426 | 2.255 | 0.024 |

Sumber: Hasil olah data *Smart PLS 4.0 (2023)*

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa:

1. Variabel Independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *Anti-Corruption Disclosure* dengan T-statistik sebesar 0,151 dan p-value sebesar 0,880
2. Variabel Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *Anti-Corruption Disclosure* dengan T-statistik sebesar 0,742 dan p-value sebesar 0,458
3. Variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Anti-Corruption Disclosure* dengan T-statistik sebesar 0,106 dan p-value sebesar 0,916
4. Variabel *Media Exposure* berpengaruh signifikan terhadap *Anti-Corruption Disclosure* dengan T-statistik sebesar 2,255 dan p-value sebesar 0,024

4.3.3 Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat diketahui melalui nilai t-statistik, P values, dan nilai *path coefficient* dari tiap hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Apabila nilai t-statistik $> 1,96$ atau nilai P values $< 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan diantara variabel. Sedangkan, bila nilai t-statistik $< 1,96$ atau P values $> 0,05$ maka pengaruh antar variabel tidak signifikan. Selain itu, jika *path coefficient* bernilai positif maka hubungan antar variabelnya berjalan searah. Sebaliknya, jika *path coefficient* bernilai negatif, hubungan antar variabelnya menjadi berlawanan arah. Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis:

Tabel 4.6
Hasil Uji Hipotesis

| | Original sample (O) | Sample mean (M) | Standard deviation (STDEV) | T statistics | P values |
|----------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------|----------|
| X1_IDK → Y_ACD | -0.024 | -0.036 | 0.158 | 0.151 | 0.880 |
| X2_KP → Y_ACD | 0.233 | 0.292 | 0.314 | 0.742 | 0.458 |
| X3_UP → Y_ACD | 0.017 | 0.020 | 0.164 | 0.106 | 0.916 |
| X4_ME → Y_ACD | 0.961 | 0.916 | 0.426 | 2.255 | 0.024 |

Sumber: Hasil olah data *Smart PLS 4.0 (2023)*

a. Hipotesis 1

Hasil uji hipotesis 1 membuktikan bahwa Independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *Anti-Corruption Disclosure*. Hal itu dapat diketahui dengan nilai t-statistik sebesar 0,151 ($<1,96$) dan nilai P values sebesar 0,880 ($>0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak.

b. Hipotesis 2

Hasil uji hipotesis 2 membuktikan bahwa Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *Anti-Corruption Disclosure*. Hal itu dapat diketahui dengan nilai t-statistik sebesar 0,742 ($<1,96$) dan nilai P values sebesar 0,458 ($>0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak.

c. Hipotesis 3

Hasil uji hipotesis 3 membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *Anti-Corruption Disclosure*. Hal itu dapat diketahui dengan nilai t-statistik sebesar 0,106 ($<1,96$) dan nilai P values sebesar 0,916 ($>0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.

d. Hipotesis 4

Hasil uji hipotesis 4 membuktikan bahwa *Media Exposure* memiliki pengaruh positif terhadap *Anti-Corruption Disclosure*. Hal itu dapat diketahui dengan nilai t-statistik sebesar 2,255 ($>1,96$) dan nilai P values sebesar 0,024 ($<0,05$). Selain itu, nilai *path coefficient* yang bernilai positif sebesar 0,961 menunjukkan bahwa meningkatnya *media exposure* searah dengan meningkatnya *anti-corruption disclosure*. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima. Adanya peningkatan *media exposure* akan dapat meningkatkan *anti-corruption disclosure*.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap *Anti-Corruption*

Disclosure

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.14 / SEOJK.05 / 2019, komisaris independen bukanlah berasal dari emiten, juga tidak mempunyai hubungan keuangan, kepemilikan saham, kepengurusan, dan atau keluarga dengan perusahaan, anggota lain dari dewan komisaris, pemegang saham pengendali, dan atau direksi, yang berpotensi mengganggu kapabilitasnya dalam berlaku independen. Independensi dewan komisaris mempresentasikan jumlah komisaris independen di dalam dewan komisaris. Fungsi pengawasan dewan komisaris independen dapat memantau dan memastikan manajemen untuk bekerja secara efektif sesuai dengan kepentingan pemilik saham maupun pemangku kepentingan yang lain. Penelitian Tirtasari & Hartomo (2019) membuktikan bahwa independensi dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Sedangkan menurut penelitian Husodo (2020) dan Indarto (2023), independensi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *Anti-Corruption Disclosure* dengan *P-value* sebesar 0,880 ($>0,05$) dan *t-statistik* sebesar 0,151 ($<1,96$). Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Tirtasari & Hartomo (2019) yang menyatakan bahwa independensi dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Namun penelitian ini telah sesuai dengan hasil penelitian Husodo (2020) dan Indarto (2023) yang membuktikan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Hal tersebut dikarenakan dalam sampel penelitian hanya terdapat 21 sampel yang proporsi komisaris independennya 50% atau lebih bila dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris. Hal itu dapat mengurangi peranan dari komisaris independen dalam melakukan fungsi pemantauan terhadap perusahaan untuk mematuhi prinsip *good corporate governance* serta bertindak sesuai kepentingan *stakeholders*. Dengan kata lain, fungsi pengawasan komisaris independen belum dapat menunjukkan keefektifan dan independensinya dalam mendorong

manajemen untuk melaksanakan pengungkapan anti korupsi. Selain itu, tidak semua dewan komisaris independen (dalam fungsinya sebagai salah satu organ utama tata kelola perusahaan) memiliki komitmen ataupun anggapan bahwa pengungkapan anti korupsi perlu diungkapkan secara lebih lengkap dan jelas. Sebab, hanya terdapat 22 sampel dalam penelitian ini yang upaya pengembangan tata kelola perusahaannya disertai dengan pengungkapan komitmen dan upaya nyata untuk melaksanakan kebijakan anti korupsi.

Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tirtasari & Hartomo (2019) yang menyatakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*, terletak pada cara pengukuran variabel *anti-corruption disclosure*. Penelitian ini menggunakan pengukuran berdasarkan penelitian Dissanayake *et al* (2011), sedangkan penelitian Tirtasari & Hartomo (2019) menggunakan variabel dummy, sehingga metode analisisnya juga berbeda. Selain itu, jumlah sampel dalam penelitian Tirtasari & Hartomo (2019) jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sampel dalam penelitian ini.

4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap *Anti-Corruption Disclosure*

Kepemilikan pemerintah merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya terdapat kepemilikan oleh pemerintah (Eryadi *et al*, 2021). Perusahaan yang terdapat kepemilikan pemerintah cenderung lebih mudah mendapat perhatian publik. Maka, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah harus terus berupaya menjaga reputasi dan legitimasi perusahaannya melalui kepekaan terhadap isu sosial, misalnya dengan pengungkapan informasi yang lebih luas terkait anti korupsi. Selain itu, kepemilikan pemerintah dapat menyebabkan perusahaan mengambil tindakan atau keputusan yang dapat memenuhi kepentingan atau aturan pemerintah, termasuk terkait pencegahan korupsi. Penelitian Supriyanto (2019) membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*. Sedangkan menurut penelitian Sari *et al* (2021), kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap *anti-corruption disclosure*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *Anti-Corruption Disclosure* dengan P-value sebesar 0,458 ($>0,05$) dan t-statistik sebesar 0,742 (<1.96). Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian Supriyanto (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi. Akan tetapi hasil penelitian ini telah sejalan dengan penelitian Sari *et al* (2021) yang membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap *anti-corruption disclosure*. Hal tersebut dikarenakan hanya terdapat 21 sampel penelitian yang proporsi kepemilikan pemerintahnya lebih dari 50%. Hal ini dapat mengurangi peranan dari pemerintah dalam mempengaruhi keputusan perusahaan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemerintah. Selain itu, diantara 21 sampel tersebut, terdapat 8 sampel yang kepemilikan saham pemerintahnya melalui perantara perusahaan induk BUMN, yaitu ANTM (2017), TINS (2017), ANTM (2018), TINS (2018), ELSA (2019), PPRO (2019), PTBA (2019), dan TINS (2019). Kondisi tersebut dapat semakin mengurangi adanya peranan pemerintah terhadap pengambilan keputusan perusahaan terkait pengungkapan anti korupsi. Sementara itu, menurut Sari *et al* (2021), pemerintah Indonesia mungkin lebih memfokuskan untuk memberantas korupsi di sektor pemerintahan karena banyaknya kasus atau isu korupsi yang melibatkan pejabat atau pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki komitmen dan semangat yang cukup untuk mendesak perusahaan mengungkapkan kebijakan anti korupsi.

Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Supriyanto (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*, terletak pada cara pengukuran variabel kepemilikan pemerintah maupun pengukuran *anti-corruption disclosure*. Kepemilikan pemerintah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, sedangkan variabel kepemilikan pemerintah dalam penelitian Supriyanto (2019) diukur berdasarkan presentase kepemilikan pemerintah. Pengukuran *anti-corruption disclosure* dalam penelitian ini berdasarkan pada penelitian Dissanayake *et al* (2011), sedangkan penelitian Supriyanto (2019) berdasarkan pada pedoman Global Reporting Index G4

terkait korupsi. Selain itu, populasi pada penelitian Supriyanto (2019) hanya terdiri dari perusahaan BUMN.

4.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Anti-Corruption Disclosure*

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu skala yang dapat mengategorikan besar kecilnya suatu perusahaan (Miftah dan Arifin, 2013). Semakin besar suatu perusahaan biasanya semakin besar juga perhatian publik dan risiko politis yang harus dihadapi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi secara lebih luas guna mempertahankan kepercayaan dari publik dan *stakeholders*. Selain itu, semakin besar perusahaan biasanya semakin banyak tekanan dari para *stakeholders* untuk mengungkapkan informasi atau aktivitas perusahaan secara lebih transparan. Penelitian Tirtasari & Hartomo (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*. Sedangkan menurut penelitian Mulyono & Raharja (2023), ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Anti-Corruption Disclosure* dengan *P values* sebesar 0,916 ($>0,05$) dan *t*-statistik sebesar 0,106 ($<1,96$). Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian Tirtasari & Hartomo (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Namun penelitian ini telah sesuai dengan hasil penelitian Mulyono & Raharja (2023) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. Hal tersebut dikarenakan sampel penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan besar, sehingga perbedaan nilai ukuran yang ada kurang cukup substansial untuk menghasilkan pengaruh terhadap *anti-corruption disclosure*. Selain itu, sebanyak 20 sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor perbankan yang memiliki kredibilitas yang cukup baik serta tidak termasuk dalam kategori industri yang memiliki risiko korupsi yang tinggi. Dalam sampel penelitian ini juga terdapat perusahaan besar yang memang memiliki kredibilitas yang tinggi, seperti ASII, INTP, dan UNTR. Maka, ada kemungkinan bahwa pengungkapan anti korupsi dianggap

sebagai nilai tambah yang tidak begitu mempengaruhi kredibilitas perusahaan yang telah tinggi. Dengan demikian, kondisi-kondisi tersebut dapat semakin mengurangi adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *anti-corruption disclosure*.

Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Tirtasari & Hartomo (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*, terletak pada cara pengukuran variabel *anti-corruption disclosure*. Penelitian ini menggunakan pengukuran berdasarkan penelitian Dissanayake *et al* (2011), sedangkan penelitian Tirtasari & Hartomo (2019) menggunakan variabel dummy, sehingga metode analisisnya juga berbeda. Selain itu, sampel dalam penelitian Tirtasari & Hartomo (2019) juga jauh lebih luas dan lebih banyak dibandingkan dengan sampel dalam penelitian ini.

4.4.4 Pengaruh *Media Exposure* terhadap *Anti-Corruption Disclosure*

Media exposure merupakan berbagai aktivitas atau tindakan perusahaan yang diberitakan oleh media (Purnomo, 2021). Publisitas media berperan penting sebagai sarana bagi publik dalam mengawasi dan mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan masalah sosial. Semakin besarnya *media exposure* terhadap perusahaan, dapat memotivasi perusahaan untuk mempublikasikan informasi yang lebih komprehensif demi menjaga legitimasi dan reputasi. Menurut penelitian Blanc *et al* (2017), *media exposure* berpengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Media Exposure* berpengaruh positif terhadap *Anti-Corruption Disclosure* dengan P-value sebesar 0,024 ($<0,05$), t-statistik sebesar 2,255 ($>1,96$), dan *path coefficient* bernilai positif sebesar 0,961. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan koefisien sebesar 0,961 dari *Media Exposure* akan meningkatkan *Anti-Corruption Disclosure*. Hal ini telah sesuai dengan penelitian Blanc *et al* (2017) yang membuktikan bahwa *media exposure* berpengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*. Menurut Widiastuti *et al* (2018), *media exposure* dapat berperan dalam mendorong proses pengembangan organisasi. Sebab dengan meningkatnya pengawasan dan perhatian dari publik terhadap perusahaan, perusahaan

akan berupaya mendapatkan legitimasi dari para stakeholders dengan mengungkapkan informasi secara lebih transparan.

